

Kajian Perbandingan *Civic Education* di Eropa dan Indonesia

Ryan Prayogi¹ Kokom Komalasari² Sapriya³ T Heru Nurgiansah⁴ Suriaman⁵

Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: ryan.prayogi@upi.edu¹ kokom@upi.edu² sapriya@upi.edu³ th3ru@upi.edu⁴ suriaman@upi.edu⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan Pendidikan kewarganegaraan di Kawasan eropa baik belanda dan inggris dengan Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara umum bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimasing-masing negara memiliki kesamaan dan terdapat perbedaan secara signifikan. Oleh sebab itu penulis ingin menyajikan sejauh mana secara konsep Pendidikan kewarganegaraan di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan Langkah-langkah: memilih tema, mencari sumber informasi, menentukan arah penelitian, mengumpulkan sumber data, menyajikan data, dan membuat bahan untuk dilakukan perbandingan dan kombinasi analisis yang dilakukan, serta melakukan evaluasi dari literatur yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baik di Belanda, Inggris dan Indonesia memiliki kesamaan untuk menekankan pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kewarganegaraan aktif baik dalam bentuk praktik menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*). Secara umum, kurikulum kewarganegaraan mencakup berbagai topik yang luas dan sangat komprehensif, membahas prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, isu-isu masyarakat kontemporer seperti keragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan, serta dimensi dunia internasional.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kawasan Eropa, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Problem kewarganegaraan di seluruh Eropa, termasuk Belanda, Inggris, dan Indonesia, memiliki sejarah panjang. Negara-negara ini memiliki hubungan historis yang erat dan banyak kesamaan. Mereka juga sangat bersaing di dunia internasional dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Memiliki kemampuan untuk mengubah politik internasional dan mengimbangi kekuatan eropa, yang membuat mereka berusaha untuk bersaing dan berkembang. Sumber daya manusia, yang dibentuk oleh sistem pendidikan, memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara (Stewart, 2019). Sebagai contoh, Amerika Serikat menggunakan pendidikan untuk memecahkan masalah sosial, sedangkan China menggunakan pendidikan untuk menghasilkan orang yang setia dan berdedikasi untuk membangun masyarakat (Arif Rohman, 2010). Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat demokratis di eropa. Sekolah mempromosikan nilai-nilai demokrasi liberal dan meningkatkan kesetiaan dan legitimasi negara (Seth, 2012). Sementara pendidikan di Inggris harus menjadi bagian dari agenda politik (Kerr, 2003). Menurut Weinberg & Flinders (2018), tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan literasi politik dan sikap demokratis generasi muda.

Negara-negara eropa terkenal dengan tingkat kemajuan Industri yang cukup pesat. Inggris adalah negara industri tertua di Eropa dengan sektor industri yang cukup mapan yang mengalami penurunan perekonomian global khususnya dikawasan eropa. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) outlook Juli 2023, pertumbuhan ekonomi kawasan eropa diproyeksikan menurun tajam menjadi 0,9 persen dan diperkirakan meningkat menjadi 1,5

persen tahun 2024. Karena disebabkan oleh dampak negatif nilai tukar perdagangan akibat perang, serta sanksi ekonomi. Selain itu dampak perang rusia dan ukraina pada tahun kedua, memicu krisis energi dikawasan eropa dan memperburuk ketahanan pangan dinegara penghasilan rendah. Sedangkan di indonesia pertumbuhan perekonomian mengalami kenaikan dan konsisten diatas 5 persen yang prospek ekonominya tetap baik serta menandakan ketahanan dari penurunan perekonomian global (IMF, World Economic Outlook, Juli 2023).

Pencapaian ini tentu tidak lepas dari partisipasi warga negara masing- masing. Jelas bahwa partisipasi warga merupakan perwujudan iklim demokrasi dalam rangka membangun negara (Bayeh, 2016). Beberapa negara mengakui bahwa warga yang loyal dan partisipatif dapat dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan (Seth 2012; Weinberg & Flinders, 2018). Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman dan keterampilan anak untuk aktif terlibat dan bertanggungjawab dalam lingkungan politik, media, masyarakat sipil, ekonomi dan hukum. Oleh karenanya, Pendidikan Kewarganegaraan penting untuk setiap negara untuk mewujudkan warga yang positif, bertanggung jawab, dan mandiri (Enyiaka et al, 2018). Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang perbandingan pendidikan kewarganegaraan dari kawasan eropa dan Indonesia. Selain karena baik di kawasan Eropa dan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, serta pernah mengalami perubahan sistem pemerintahan dan sistem pendidikan. Perlu untuk dilakukan perbandingan secara konsep historis, sistem pendidikan, dan kurikulum nasional yang menjadi dasar untuk mendeskripsikan bagaimana kerangka pendidikan kewarganegaraan di kawasan Eropa dan di negara Indonesia beserta latar belakang yang membentuknya.

Secara konsep menurut Somantri & Winataputra (2017) menyatakan bahwa memahami suatu negara membutuhkan pendekatan lain yang melihat kondisi suatu negara secara langsung. Metode ini mencakup melihat sejarah suatu negara dari berbagai sudut pandang, yang merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Menjelaskan bahwa mendapatkan informasi tentang empat hal: perkembangan sejarah, perkembangan ekonomi, identitas nasional, dan budaya kewarganegaraan dapat membantu memahami kondisi suatu negara. Empat hal ini dapat digunakan untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan di suatu negara dan untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara berbeda. Sehingga perlu mempelajari dan membandingkan pendidikan kewarganegaraan baik di kawasan eropa dan indonesia tersebut, akan diketahui bagaimana keadaban atau civic virtue masing-masing negara berbeda. Ini karena masing-masing negara memiliki sejarah, perkembangan ekonomi, identitas nasional, dan budaya masyarakat yang berbeda. Akibatnya, pengalaman terbaik (*best practice*) akan menjadi acuan atau bahan pembanding untuk negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan atau telaah dokumen. Sekaligus dengan mengumpulkan referensi dalam tinjauan pustaka ini, dikumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk dianalisis dan disintesis untuk diambil kesimpulan (Mardalis, 1999). Hasil analisis dan sintesis penelitian terdahulu dilakukan untuk menarik kesimpulan mengenai perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Eropa dan Indonesia. Selain itu, penelitian kepustakaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) memilih topik, 2) mencari sumber informasi, 3) menentukan arah penelitian, 4) mengumpulkan sumber data, 5) menyajikan data dan 6) membuat dokumen. Menyelesaikan. laporan. Saat ini, analisis data dalam penelitian sangat berharga dan memberikan referensi yang dapat dimodifikasi tergantung konteksnya (Krippendoff, 1993). Selain pemilihan, perbandingan, dan kombinasi

analisis yang dilakukan, tinjauan lanjutan terhadap penelusuran literatur dan supervisi juga dilakukan untuk menjaga dan mencegah kesenjangan dalam penelusuran literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Civic Education di eropa

Secara konsep di eropa bahwa Citizenship Education cenderung memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Civic Education. Civic education atau civics memiliki cakupan lebih sempit dari pada Citizenship education yang mengacu pada proses transmisi pengetahuan mengenai struktur konstitusional dan lembaga politik suatu negara. Sedangkan Citizenship education lebih mencakup kompetensi tambahan, seperti tanggung jawab sosial, keterampilan dan hubungan antarpribadi yang efektif. Studi Eurydice 2017 menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari kurikulum nasional untuk pendidikan umum di semua negara. Serta jauh lebih dari sekedar mengajarkan pendidikan kewarganegaraan tentang lembaga politik atau sejarah suatu negara. Semua negara di eropa memiliki kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang berkaitan dan berinteraksi secara efektif dan konstruktif dengan orang lain, bertindak secara demokratis, berfikir kritis dan bertanggung jawab secara sosial (Coster, 2017).

Pendidikan kewarganegaraan dalam laporan Eropean Commission (2017) ini dipahami sebagai bidang studi yang dipromosikan di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk membina kehidupan bersama yang harmonis dan pengembangan yang saling menguntungkan bagi individu dan masyarakat di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Dalam masyarakat demokratis, pendidikan kewarganegaraan mendukung siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, terinformasi dan bertanggung jawab, yang bersedia dan mampu mengambil tanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan untuk komunitas mereka di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan perlu membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam empat bidang kompetensi yang luas (Ten Dam et al, 2011): 1) berinteraksi secara efektif dan konstruktif dengan orang lain; 2) berpikir kritis; 3) bertindak secara bertanggung jawab secara sosial; dan 4) bertindak secara demokratis. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melibatkan pengajaran dan pembelajaran tentang topik-topik yang relevan di dalam kelas, tetapi juga pengalaman praktis yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan di sekolah dan masyarakat yang lebih luas yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk peran mereka sebagai warga negara. Guru dan kepala sekolah memainkan peran kunci dalam proses pembelajaran ini. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada mereka sangat penting bagi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang efektif.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari kurikulum nasional di semua negara. Pendidikan kewarganegaraan disampaikan di sekolah-sekolah melalui tiga pendekatan utama: sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, sebagai bagian dari mata pelajaran atau bidang pembelajaran lain, atau sebagai dimensi lintas kurikulum. Namun, kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini sering digunakan. Dua puluh negara atau wilayah mendedikasikan mata pelajaran wajib yang terpisah untuk pendidikan kewarganegaraan, terkadang dimulai dari tingkat sekolah dasar, tetapi lebih sering di tingkat sekolah menengah. Lamanya waktu pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah sangat bervariasi antar negara, mulai dari 12 tahun di Perancis hingga satu tahun di Bulgaria dan Turki (Education, 2012). Kurikulum negara-negara Eropa mencerminkan dengan baik sifat kewarganegaraan yang multi-dimensi. Sekolah-sekolah memiliki tujuan tidak hanya dalam hal pengetahuan teoritis yang harus diperoleh siswa, tetapi juga dalam hal keterampilan yang harus dikuasai, dan sikap serta nilai-nilai yang harus dikembangkan; partisipasi aktif siswa di

dalam dan di luar sekolah juga sangat dianjurkan. Secara umum, kurikulum kewarganegaraan mencakup berbagai topik yang luas dan sangat komprehensif, membahas prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, isu-isu masyarakat kontemporer seperti keragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan, serta dimensi Eropa dan internasional.

Selain itu sebagai perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Eropa penulis mengambil negara Belanda dan Inggris sebagai bahan acuan untuk dibandingkan secara kajian literatur dengan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan di Belanda disebut sebagai Social Structure and Life Skills Tingkat Sekolah Dasar dan Civics and Citizenship and social Studies Tingkat Sekolah Menengah sedangkan di Inggris secara nomenklatur disebut Citizenship Education (Kerr, 2003; Winataputra, 2001; 2012). Secara historis bahwa Pendidikan kewarganegaraan di negara Belanda, pasca krisis yang terjadi di negara Belanda, berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat merasa kecewa. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengembalikan rasa percaya dan dukungan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut berperan aktif, berkontribusi, dan juga berpartisipasi aktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara Belanda. Oonk, (2014: 13) salah satu upayanya yaitu dengan mengubah orientasi kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan.

Sehingga peserta didik memahami nilai-nilai demokrasi, multikultural, pluralisme agar peserta didik memiliki pemahaman bahwa non muslim ataupun muslim selama ia warga negara Belanda, ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara (Doppen, 2007: 103). Belanda berpartisipasi dalam Studi Komparatif Internasional Pendidikan Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan (ICCS) pada tahun 2009 dan 2016. Dalam kedua studi tersebut, kinerja pemuda Belanda cukup buruk dalam hal pengetahuan kewarganegaraan dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Mereka juga mendapat nilai sangat buruk dalam hal sikap terhadap hak-hak imigran. Temuan-temuan ini menyebabkan meningkatnya kekhawatiran dalam perdebatan politik dan pendidikan serta meningkatnya dukungan terhadap perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan kewarganegaraan (Veugelers, 2021). Sedangkan di negara Inggris (UK) Sejarah Inggris ditandai dengan banyaknya perebutan kekuasaan, konflik antar kerajaan, dan perang saudara. Itu berasal dari zaman Romawi. Bangsa Romawi menginvasi Inggris pada tahun 43 M pada masa pemerintahan Kaisar Claudius, setelah itu wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Kekaisaran Romawi dengan nama 'Inggris'.

Selanjutnya, setelah jatuhnya Roma, Inggris juga diperintah oleh para imigran yang juga terbagi menjadi beberapa suku. Namun pada abad ke-7 suku-suku tersebut bersatu menjadi beberapa kerajaan, antara lain Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, Essex, Kent, dan Sussex. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan tersebut saling menaklukkan dan mendominasi, hingga pada tahun 1707 Parlemen Inggris dan Skotlandia sepakat untuk menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi sebuah kesatuan politik yang disebut Britania Raya. Sejak tahun 1997, terdapat minat yang serius terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokratis di Inggris. Hal ini dipublikasikan dalam sebuah dokumen bernama Buku Putih tentang Keunggulan di Sekolah, yang menyatakan komitmen untuk "memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi". Sebuah Kelompok Penasihat Kewarganegaraan (AGC) telah dibentuk, bertugas meninjau kurikulum nasional dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Pada tanggal 22 September 1998, Citizenship Advisory Group (AGC) berhasil menghasilkan laporan akhir AGC yang berjudul 'Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Demokratis di Sekolah'. Dokumen ini kemudian digunakan sebagai acuan dan panduan pengembangan dan implementasi pendidikan kewarganegaraan di

Inggris (Winataputra, USA, 2012). Pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk mengatasi defisit bersejarah ini jika kita ingin menghindari penurunan lebih lanjut dalam kualitas kehidupan publik kita dan jika kita ingin mempersiapkan semua orang muda untuk berpartisipasi secara terinformasi, tidak hanya di Inggris Raya yang lebih terbuka, tetapi juga di Eropa dan dunia yang lebih luas, ketika kita memasuki abad berikutnya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali jika ada komitmen politik dan profesional yang kuat terhadap pendidikan kewarganegaraan (Boothroyd, 1998).

Selain itu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Belanda disebutkan "Dutch Minister of Education proposed making it compulsory for all schools in The Netherlands to stimulate active citizenship and social integration. Teachers must give these educational goals a tangible form in their practice " bahwa Menteri Pendidikan Belanda mengusulkan untuk mewajibkan semua sekolah di Belanda untuk mendorong kewarganegaraan aktif dan integrasi sosial. Guru harus mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dalam bentuk nyata dalam praktiknya (Hélène et al, 2008). Sedangkan di Inggris (UK) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Sejak tahun 1997, terdapat minat yang serius terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokratis di Inggris. Hal ini dipublikasikan dalam sebuah dokumen bernama Buku Putih tentang Keunggulan di Sekolah, yang menyatakan komitmen untuk "memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi". Sebuah Kelompok Penasihat Kewarganegaraan (AGC) telah dibentuk, bertugas meninjau kurikulum nasional dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Pada tanggal 22 September 1998, Citizenship Advisory Group (AGC) berhasil menghasilkan laporan akhir AGC yang berjudul 'Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Demokratis di Sekolah'. Dokumen ini kemudian digunakan sebagai acuan dan panduan pengembangan dan implementasi pendidikan kewarganegaraan di Inggris (Winataputra, USA, 2012).

Civic Education di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia disebut sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (K13), Pendidikan kewarganegaraan (KBK 2006). Sedangkan posisi dalam kurikulum pendidikan nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bersifat wajib dan berdiri sendiri dan ada juga yang terintegrasi pada jenjang pendidikan dasar. (Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003) dan pada jenjang Perguruan Tinggi (Undang-Undang No 12 Tahun 2012). Dalam sejarahnya bahwa Sejarah perkembangan PKn di Indonesia dibagi menjadi tiga periode waktu (Cholisin;2000:2.11) yaitu: Sebelum Proklamasi pelajaran civics sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. pengajaran Burgerkunde dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (My enemy is goverment) tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (Diffuese support). Meskipun pada waktu itu, bangsa Indonesia dijajah namun konsep tentang pendidikan politik maupun pelaksanaannya lewat pendidikan formal dan non formal tetap berlangsung.

Setelah Proklamasi: pertama muncul tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan, Tahun 1959 diintrodusir pelajaran civics dengan "Civics Manusia Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) sebagai buku sumber, Tahun 1962 istilah civics diganti dengan Kewargaan Negara, Tahun 1968 Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara, Tahun 1975 Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), Tahun 1978 sangat dominannya materi P-4 dalam PMP, Tahun 1984 masih dengan nama PMP, Tahun 1994 di ganti dengan nama PPKn, Tahun 1999 materi P-4 di cabut. Era Reformasi hingga sekarang: Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani

(Civil society) merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi IKn-PKn akan memperkuat berkembangnya Civil society. Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan memiliki keterikatan terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (Cholisin, 2000: 2.23).

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menurut Somantri (2001: 279) menyatakan bahwa tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Sedangkan Sapriya (2001) menyatakan, tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Serta Maftuh dan Sapriya (2005: 30), menambahkan bahwa tujuan negara mengembangkan PKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi Civics dan Civics education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakikatnya, objek kajian Pkn adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007). Dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan bahwa objek studi Civics adalah: (1) tingkah laku, (2) tipe pertumbuhan berpikir, (3) potensi yang ada pada setiap diri warga negara, (4) hak dan kewajiban, (5) cita-cita dan aspirasi, (6) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian internasional, moral Pancasila), dan (7) usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan.
3. Ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia).
4. Ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara.
5. Ruang lingkup kekuasaan dan politik.
6. Ruang lingkup Pancasila.
7. Ruang lingkup globalisasi. (Hamid Darmadi, 2020:198)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar dan menengah, yang mempunyai misi profesional yaitu mendidik peserta didik menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang diharapkan dalam rangka pembinaan generasi, anak menjadi warga negara yang baik. Anak merupakan putative citizen, yaitu warga negara yang "belum siap" karena masih perlu dididik untuk menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007: 11). Sebagai sarana pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah, pendidikan kewarganegaraan di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam segala aspek kewarganegaraan, khususnya: (1) pengetahuan kewarganegaraan, (2) sikap kewarganegaraan, (3) keterampilan, (4) determinasi warga negara, (5) partisipasi warga negara, (6) kapasitas warga negara (Somantri & Winataputra, 2017: 94). Semua wilayah sasaran tersebut harus ditempatkan pada konteks

ideologi, alat dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pedoman hidup berbangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus dikonsep, dimaknai, dan difungsikan sebagai entitas sentral, sumber rujukan, dan tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar.

Pembahasan

Setelah diuraikan tentang latar belakang dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di eropa dan indonesia. Dari keenam fokus kajian terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang dirangkum pada tabel dibawah.

Tabel 1. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan Belanda, Inggris dan Indonesia

No	Aspek Perbandingan	Belanda	Inggris	Indonesia
1	Istilah/ Nomenklatur	Secara nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan di Belanda disebut sebagai Social Structure and Life Skills Tingkat Sekolah Dasar dan Civics and Citizenship and social Studies Tingkat Sekolah Menengah. Kerr (1999:190; adaptasi oleh Winataputra (2001;2012)	Secara nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris disebut sebagai Citizenship Education Winataputra (2001;2012)	Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia disebut sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (K13) Pendidikan kewarganegaraan (KBK 2006)
2	Posisi dalam kurikulum nasional	Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Belanda dilihat dari sifat dan statusnya kurikulum Pendidikan kewarganegaraan di belanda wajib bagian dari program inti untuk semua tingkat dalam pendekatan terpadu atau Integrated dan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu "social sciences" atau social studies" atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain (Winataputra, 2001)	Pertimbangan dari AGC (QCA. 1998: 22-24) merekomendasikan: <i>Citizenship Education</i> (CE) menjadi elemen wajib kurikulum yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Dengan demikian jatidiri " <i>citizenship education</i> " model Inggris yang di dalam perspektif internasional (Kerr, 1999) termasuk model " <i>thick citizenship education</i> " yang memiliki visi maksimum yakni " <i>Education FOR Citizenship</i> " dengan modus " <i>across curriculum</i> ".	Bersifat wajib dan berdiri sendiri dan ada juga yang terintegrasi pada jenjang pendidikan dasar. (Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003) dan pada jenjang Perguruan Tinggi (Undang-Undang No 12 Tahun 2012).
3	Sejarah perkembangan	Pendidikan kewarganegaraan di negara Belanda, pasca krisis yang terjadi di negara Belanda, berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat merasa kecewa. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengembalikan rasa	Pendidikan kewarganegaraan (<i>citizenship education</i>) di Inggris mulai mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebagai wahana pendidikan demokrasi pada 1997 yang terbit dalam dokumen yang dikenal dengan " <i>white paper, excellence in School</i> " yang mencanangkan komitmen " <i>to strengthen education for citizenship</i>	Sejarah perkembangan PKn di Indonesia dibagi menjadi tiga periode waktu (Cholisin;2000:2.11) yaitu: Sebelum Proklamasi pelajaran civics sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. pengajaran Burgerkunde dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah agar rakyat jajahan lebih memahami hak

		<p>percaya dan dukungan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut berperan aktif, berkontribusi, dan juga berpartisipasi aktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara Belanda. Oonk, (2014: 13) salah satu upayanya yaitu dengan mengubah orientasi kewarganegaraan. Sehingga peserta didik memahami nilai-nilai demokrasi, multikultural, pluralisme agar peserta didik memiliki pemahaman bahwa non muslim ataupun muslim selama ia warga negara Belanda, ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara (Doppen, 2007: 103).</p>	<p><i>and the teaching of democracy in schools</i>. Terbentuklah <i>Advisory Group on Citizenship</i> (AGC) dengan tugas untuk mengkaji dan memberi rekomendasi dalam rangka menyempurnakan kurikulum nasional yang pada tanggal 22 September 1998 berhasil menyelesaikan laporan akhir AGC dengan judul <i>Education for Citizenship and the teaching of Democracy in Schools</i>. Dokumen inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dan rambu-rambu pengembangan dan pelaksanaan <i>citizenship education</i> di Inggris (Winataputra, US, 2012).</p>	<p>dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (My enemy is goverment) tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (Diffuese support). Meskipun pada waktu itu, bangsa Indonesia dijajah namun konsep tentang pendidikan politik maupun pelaksanaannya lewat pendidikan formal dan non formal tetap berlangsung. Setelah Proklamasi: pertama muncul tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan, Tahun 1959 diintrodusir pelajaran civics dengan "Civics Manusia Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) sebagai buku sumber, Tahun 1962 istilah civics diganti dengan Kewargaan Negara, Tahun 1968 Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara, Tahun 1975 Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), Tahun 1978 sangat dominannya materi P-4 dalam PMP, Tahun 1984 masih dengan nama PMP, Tahun 1994 di ganti dengan nama PPKn, Tahun 1999 materi P-4 di cabut. Era Reformasi hingga sekarang: Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani (Civil society) merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi IKn-PPKn akan memperkuat berkembangnya Civil society. Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki</p>
--	--	--	--	---

				kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan memiliki keterikatan terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (Cholisin, 2000: 2.23).
4	Tujuan	<p>“ Dutch Minister of Education proposed making it compulsory for all schools in The Netherlands to stimulate active citizenship and social integration. Teachers must give these educational goals a tangible form in their practice “ bahwa Menteri Pendidikan Belanda mengusulkan untuk mewajibkan semua sekolah di Belanda untuk mendorong kewarganegaraan aktif dan integrasi sosial. Guru harus mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dalam bentuk nyata dalam praktiknya. (Hélène et al, 2008)</p>	<p>Tujuan <i>Citizenship Education</i> di Inggris menurut Winataputra U.S. (2012:16) adalah pendidikan untuk kewarganegaraan, karena itu bukanlah hanya menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan dan masyarakat kewargaan tetapi juga pada pengembangan nilai, keterampilan dan pengertian. Oleh karenanya, Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris penting untuk menanamkan hak individu dalam sistem demokrasi (Weinberg & Flinders, 2018).</p>	<p>Somantri (2001: 279) menyatakan bahwa tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Sedangkan Sapriya (2001) menyatakan, tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Serta Maftuh dan Sapriya (2005: 30), menambahkan bahwa tujuan negara mengembangkan PKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
5	Beban belajar	<p>80-100 Jam Per Tahun Untuk SD dan 180 Jam Selama 3 tahun (usia - 15); 2-4 Jam Per minggu (usia 16-18). Kerr (1999:190; adaptasi oleh Winataputra (2001;2012)</p>	<p>Beban Pendidikan Kewarganegaraan pada tahap kunci 3 (siswa usia 11 hingga 14 tahun), tahap kunci 4 (siswa usia 14 hingga 16 tahun), dan satu skema kerja untuk tahap kunci 1 dan 2 (siswa usia 5 hingga 11 tahun). (Kerr, 2003)80-100 Jam Per Tahun Untuk SD dan 180 Jam Selama 3 tahun (usia - 15); 2-4 Jam Per minggu (usia 16-18). Kerr</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan Dasar Terintegrasi dengan mata pelajaran lain dan di Tingkat Sekolah Dasar PPKn berdiri sendiri 2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (beban Pelajaran 2 JP KBK,3 JP K13) 3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (Beban pelajaran 2 JP).

			(1999:190; adaptasi oleh Winataputra (2001;2012)	(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 4. Perguruan Tinggi 2-3 SKS (SK Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006)
6	Ruang lingkup kajian	<p>Materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di Belanda adalah sebagai berikut: Pendidikan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentang esensi politik dan tanggung jawab warga Belanda dan Eropa; • Berperilaku dengan rasa hormat terhadap standar dan nilai yang berlaku umum; • Memasukkan esensi gerakan keagamaan yang memainkan peran penting dalam pluralistik Belanda • Belajar menghargai perbedaan pendapat; • Menangani lingkungan dengan hati-hati; • Membandingkan tata ruang lingkungan mereka dengan lingkungan lain di lingkungan • Tentang orang-orang bersejarah penting dan peristiwa dalam sejarah Belanda <p>Pendidikan menengah pertama, Untuk mengajukan pertanyaan yang berarti tentang masalah sosial dan fenomena, untuk mengambil sudut pandang substantif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dan menghadapi kritik dengan cara yang terhormat; • Alam kerangka sepuluh periode untuk menempatkan kejadian, perkembangan, dan orang secara benar; 	<p>Materi yang diajarkan sebagai ketercapainya tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Inggris sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. demokrasi dan otorokrasi; 2. kerjasama dan konflik; 3. kesetaraan dan keragaman; 4. kejujuran, keadilan, rule of law, aturan-aturan, hukum dan hak asasi manusia; 5. kebebasan dan ketertiban; 6. individual dan masyarakat; 7. kekuasaan dan otoritas; 8. hak-hak dan tanggung jawab (Crick, 1998: 44). 	<p>Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi Civics dan Civics education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakikatnya, objek kajian Pkn adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007). Dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan bahwa objek studi Civics adalah: (1) tingkah laku, (2) tipe pertumbuhan berpikir, (3) potensi yang ada pada setiap diri warga negara, (4) hak dan kewajiban, (5) cita-cita dan aspirasi, (6) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian internasional, moral Pancasila), dan (7) usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan. 3. Ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia). 4. Ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara. 5. Ruang lingkup kekuasaan dan politik.

		<ul style="list-style-type: none"> • Tentang kesepakatan, perbedaan dan perubahan budaya dan agama di Belanda • Pandangan dan gaya hidup masing-masing akan meningkatkan masyarakat; • Hal penting dari cara sistem politik Belanda beroperasi sebagai demokrasi, dan belajar perbedaannya • Cara orang terlibat dalam proses politik; (Jeroen Bron; Bart Maes, 2005) 		6. Ruang lingkup Pancasila. Ruang lingkup globalisasi. (Hamid Darmadi, 2020:198)
--	--	---	--	--

Hasil diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kerr (1999) tentang konsep pendidikan kewarganegaraan: pertama, pendidikan tentang kewarganegaraan yang berfokus untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang sejarah nasional, struktur, dan proses serta kehidupan politik pada pemerintahan. Kedua, pendidikan melalui kewarganegaraan mengajak siswa untuk terlibat langsung dengan melakukan kegiatan dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran disekolah. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud adalah membekali siswa dengan pengetahuan dan dilengkapi oleh instrumen- instrumen yang mendukung dalam pembelajaran seperti keterampilan, bakat, nilai-nilai, dan sikap atau disposisi yang ada di dalam diri siswa, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil analisis di Belanda dan Inggris, dapat disimpulkan bahwa negara tersebut mempunyai kebijakan yang dilihat dari status kurikulum Pendidikan kewarganegaraan di belanda wajib bagian dari program inti untuk semua tingkat dalam pendekatan terpadu atau Integrated dan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu "social sciences" atau social studies" atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Di sisi lain, pendidikan Kewarganegaraan atau *Citizenship Education* (CE) di Inggris juga menjadi elemen wajib kurikulum yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Hal tersebut diwujudkan sebagai hasil belajar untuk semua jenjang persekolahan dan bukan sebagai suatu program pengajaran atau mata pelajaran, *learning outcome* nya juga dirumuskan secara spesifik. Pendidikan kewarganegaraan bukanlah suatu mata pelajaran atau topik tertentu, namun diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur kurikulum secara keseluruhan dengan memasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Maka baik Belanda maupun Inggris sama-sama menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai elemen wajib dalam kurikulum nasional yang diajarkan ditingkat sekolah.

Sedangkan di indonesia bahwa pendidikan kewarganegaraan juga sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003) dan pada jenjang Perguruan Tinggi (Undang-Undang No 12 Tahun 2012). Maka secara umum kurikulum nasional bahwa Pendidikan kewarganegaraan masuk dan wajib dicantumkan dalam kurikulum nasional masing-masing negara dan menjadi mata pelajaran wajib diajarkan semua jenjang sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum negara-negara Eropa mencerminkan dengan baik sifat

kewarganegaraan yang multi-dimensi. Sekolah-sekolah memiliki tujuan tidak hanya dalam hal pengetahuan teoritis yang harus diperoleh siswa, tetapi juga dalam hal keterampilan yang harus dikuasai, dan sikap serta nilai-nilai yang harus dikembangkan; partisipasi aktif siswa di dalam dan di luar sekolah juga sangat dianjurkan. Secara umum, kurikulum kewarganegaraan mencakup berbagai topik yang luas dan sangat komprehensif, membahas prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, isu-isu masyarakat kontemporer seperti keragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan, serta dimensi Eropa dan internasional.

Maka dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan baik di Belanda, Inggris dan Indonesia memiliki kesamaan untuk menekankan pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kewarganegaraan aktif baik dalam bentuk praktik menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*). Serta memiliki kesamaan terkait cakupan materi yang diajarkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan kajian historis negara masing-masing tetapi secara umum kajian Pendidikan kewarganegaraan dimasing negara tidak jauh berbeda dengan mengangkat isu-isu global didalamnya yang menjadi aksi nyata warganegara berpartisipasi dalam kewarganegaraan global.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan suatu negara ternyata bisa berbeda karena dipengaruhi oleh enam faktor berupa perkembangan sejarah, kurikulum nasional, tujuan Pendidikan kewarganegaraan, beban belajar, dan ruang lingkup kajian materi yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Keenam hal tersebut berbeda di tiap negara, seperti di kawasan eropa baik belanda dan inggris yang juga memiliki perbedaan dalam nomenklatur, sejarah, beban belajar dan ruang lingkup kajian materi yang di ajarkan disekolah, tetapi terdapat juga persamaan secara umum dengan pendidikan kewarganegaraan di indonesia bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi serta masuk kedalam kurikulum nasional dan secara definisi secara umum sama. Berdasarkan hasil kajian dapat ditarik *core* atau inti dari pendidikan kewarganegaraan pada negara tersebut bahwa baik di belanda dan Inggris *core* nya adalah sejarah dan ideologi barat yang tercantum dalam konstitusi yang menjadi pedoman bagi warga negara serta dalam konteks materi pendidikan kewarganegaraan yang tercantum dalam pembelajaran sekolah. Begitu juga di indonesia bahwa Pendidikan Kewarganegaraan juga berlandaskan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang harus menjadi pedoman bagi warga negara serta sebagai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, baik belanda, inggris dan indonesia menekankan pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kewarganegaraan aktif baik dalam bentuk praktik menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*). Serta memiliki kesamaan terkait cakupan materi yang diajarkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan kajian historis negara masing-masing tetapi secara umum kajian Pendidikan kewarganegaraan dimasing negara tidak jauh berbeda dengan mengangkat isu-isu global didalamnya yang menjadi aksi nyata warganegara berpartisipasi dalam kewarganegaraan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayeh, E. (2016). Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(1), 31-36.
- Boothroyd, B. (1998). Education for citizenship and the teaching of democracy in schools: *Final report of the Advisory Group on Citizenship*. pp.1-88.

- <https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/4385/1/crickreport1998.pdf>
- Budimansyah, D. (2007). Pendidikan demokrasi sebagai konteks civic education di Negaranegara berkembang. *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1(No.1), 23-35.
- Coster, I De, & Sigalas, E (2017). *Citizenship Education at School in Europe, 2017. Eurydice Brief.*, ERIC, <https://eric.ed.gov/?id=ED588800>.
- Crick, B. (1998). Advisory Group on Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools: *Final report of the Advisory Group on Citizenship*.pp.3-80.
- Doppen, F. H. (2007). Now what? Rethinking civic education in the Netherlands. *Education, Citizenship and Social Justice*, 2(2), pp 103-118. <https://doi.org/10.1177/1746197907077043>.
- Education, A (2012). Citizenship education in Europe. *Publications Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice)*. https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/citizenship_education_in_europe_en.pdf.
- Enyiaka, J.U., Aminigo, I.M., Osaat, S.D. (2018). The Role Of Civic Education In Personality And National Development. *International Journal of Social Science and Humanities Research*. 6(1), 584-589.
- European, Commission. (2017). European Education and Culture Executive Agency, *Citizenship education at school in Europe*, Publications Office, <https://data.europa.eu/doi/10.2797/536166>
- Hélène Leenders , Wiel Veugeliers & Ewoud De Kat (2008) Teachers' views on citizenship education in secondary education in The Netherlands, *Cambridge Journal of Education*, 38:2, pp 155-170, <https://doi.org/10.1080/03057640802063106>.
- Jeroen Bron. (2005). Citizenship and social integration in the Netherlands. Educational development between autonomy and accountability. pp 56-57. Bart Maes. (2005). Different faces of citizenship Development of citizenship education in European countries. Belgium : CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. pp 1-176. https://www.cidree.org/fileadmin/files/pdf/publications/YB_5_Different_faces_of_citizenship.pdf#page=51.
- Kerr, D (2003). Citizenship education in England: The making of a new subject. *JSSE-Journal of Social Science Education*, jsse.org, [file:///C:/Users/LENOVO%20130-141KB/Downloads/Citizenship Education in England The Making of a N.pdf](file:///C:/Users/LENOVO%20130-141KB/Downloads/Citizenship_Education_in_England_The_Making_of_a_N.pdf)
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Quality Curriculum Association.
- Maftuh, B & Sapriya. (2005). Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus*, 1 (5), hlm. 319-321.
- Oonk, H. (2014). The european cooperation is facing new challenges - Some impact on citizenship education in the Netherlands. *Journal of Social Science Education*, 13(3), pp 73- 82. <https://doi.org/10.2390/jsse-v13-i3- 1311>.
- Rohman, Arif. (2013). Pendidikan Komparatif Dasar-dasar Teori Perbandingan Pendidikan antar Negara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sapriya. (2001). Analisis Signifikasi "Content" PKn Persekolahan dalam Menghadapi Tuntutan Era Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Civicus* (1) 57-72. Bandung. Jurusan PMPKN. UPI.
- Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. (disertasi publikasi Universitas Pendidikan Indonesia). <https://repository.upi.edu/7630/>
- Seth, M (2012) Education zeal, state control and citizenship in South Korea, *Citizenship*

- Studies, 16:1, 13-28, DOI: [10.1080/13621025.2012.651400](https://doi.org/10.1080/13621025.2012.651400).
- Somantri, M. N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis. (Sapriya & R. Machfiroh, Ed.). Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Stewart, F. (2019). The Human Development Approach: An Overview. *Oxford Development Studies*, 47(2), 135-153.
- Ten Dam, G. et al., (2011). Measuring young people's citizenship competences. *European Journal of Education*, 46 (3), pp. 354-372.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Veugelers, W. (2021). Citizenship Education in the Netherlands: Country Profiles Citizenship Education Around the World. Bpb: Bundeszentrale Fur Politische Bildung. pp.1-11. <https://www.bpb.de/die-bpb/partner/nece/329084/citizenship-education-in-the-netherlands/>
- Weinberg, J., & Flinders, M. (2018). Learning for democracy: The politics and practice of citizenship education. *British Educational Research Journal*, 44(4), 573-592.